

14. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota
Blitar Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Memasuki dunia informasi global yang mengedepankan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, tak terkecuali dalam proses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dituntut untuk aktif mengadaptasi dan memfasilitasi proses akselerasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di segala sektor. Sehingga akan tercipta peningkatan efisiensi dan efektifitas di bidang pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu upaya pemerintah menciptakan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Akuntabilitas organisasi yang diharapkan akan bermuara pada penyelenggaraan *good governance* ini dapat terlaksana dengan optimal melalui pemanfaatan *e government*. Melalui pemanfaatan *e government* secara optimal maka tidak terbatas pada kesiapan infrastruktur dan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat tetapi juga akan meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengakses informasi publik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar menyusun rencana strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan rencana strategis ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan yang selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 272 (1), (2) dan (3) yang

menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

Perencanaan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Selanjutnya rencana strategis perangkat daerah dirumuskan ke dalam rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD. Renstra juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota serta sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Perubahan Rencana Strategis perangkat daerah dapat dilakukan apabila adanya tindaklanjut terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, perubahan Perwali Tupoksi dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ. Terbitnya aturan tersebut mengakibatkan perubahan dilevel kegiatan dan sub kegiatan baik pada nomenklatur, indikator, target dan substansinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - g. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
 - i. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Undang- Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
- o. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBHDR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- q. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Nomor 12 Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
- r. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030; dan
- s. Peraturan daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Timur tahun 2019 - 2024;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031;
- v. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar tahun 2011 – 2030;
- w. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 02 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025;

- x. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- y. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7)
- z. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 ini dimaksudkan untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika Dan Statistik selama lima tahun, yang disusun berpedoman pada perubahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026;

1.3.2. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode pembangunan yang lalu;
- b. Mengidentifikasikan permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik selama 5 (lima) tahun mendatang;
- c. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
- d. Menetapkan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang;
- e. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik selama 5 (lima) mendatang;

- f. Menyediakan panduan penyusunan rencana kerja (renja) perangkat daerah dan RKA SKPD; dan
- g. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Pada bab ini menguraikan tentang struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya, sumber daya organisasi, capaian kinerja pelayanan dinas, tantangan dan peluang serta pengembangan pelayanan dinas yang bisa dicapai melalui Renstra perangkat dinas.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Pada bab ini memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga Terkait, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar dan Penentuan Isi-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini memuat pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah dinas

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Pada bab ini memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi kesimpulan secara singkat dan representatif dari uraian Bab – Bab sebelumnya serta harapan yang diinginkan menuju peningkatan pelayanan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik serta menjadi pedoman bagi pembangunan sampai dengan Tahun 2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan lagi melalui Peraturan

Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.

Kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Adapun tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik adalah sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan.
2. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan tugas pokok dan fungsi :
 - a. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi informasi dan komunikasi publik;
 - b. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi aplikasi informatika;
 - c. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi statistik sektoral di lingkup daerah kota;
 - d. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - e. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 - f. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
 - g. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 - h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - j. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (!KM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

- k. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- l. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kepala Dinas dibantu oleh sekretariat dan bidang - bidang, dan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan;

Untuk menjalankan tugas tersebut Sekretariat menjalankan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/ kegiatan Sekretariat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- f. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;

- h. pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- i. pengoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas;
- j. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- m. fasilitasi pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- p. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- q. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- r. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- s. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- t. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- u. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- v. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP);
- w. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang komunikasi dan Informatika, bidang statistisk serta bidang persandian;

- x. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang komunikasi dan Informatika, bidang statistik serta bidang persandian secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- y. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- z. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
- aa. pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- bb. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh 2 Sub bagian yaitu Sub Bagian Program dan Kepegawaian dan Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Adapun tugas **Sub Bagian Program dan Kepegawaian** yaitu:

- a. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang program dan kepegawaian ;
- b. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan masing-masing unit di lingkungan Dinas;
- c. menyusun, melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan;
- d. melakukan kegiatan pelayanan kegiatan program dan kepegawaian dilingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas ;
- g. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas dan Dokumen Perubahannya;
- h. melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan perubahan Penetapan Kinerja;
- i. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi program dan kepegawaian;
- l. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian dan tugas-tugas kehumasan;
- m. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian;
- n. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- o. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Sedangkan **Sub Bagian Umum dan Keuangan** melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, penatausahaan barang dan administrasi pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
- e. melakukan penatausahaan keuangan Dinas dan pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas, serta verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
- f. penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas;
- g. melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan;

- h. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
- i. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- j. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
- k. melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m. melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain Sekretaris, tugas Kepala Dinas dibantu oleh bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun bidang yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut :

1) Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk menjalankan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menjalankan **fungsi** :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan program/ kegiatan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- e. pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
- f. pengelolaan Media Komunikasi Publik;

- g. pelayanan Informasi Publik;
- h. pelayanan hubungan media;
- i. penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- j. pengelolaan manajemen komunikasi krisis;
- k. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- l. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

2) Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Aplikasi Informatika yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Aplikasi Informatika;

Untuk menjalankan tugas Bidang Aplikasi Informatika menjalankan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Aplikasi Informatika berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang aplikasi informatika;
- c. pelaksanaan pendaftaran nama domain pemerintah daerah;
- d. penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah;
- f. penatalaksanaan dan pengawasan e-govemment dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- h. pengelolaan pusat data pemerintahan daerah;

- i. penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
- k. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
- l. pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- m. penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah;
- n. pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas;
- o. pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
- p. pemantauan, evaluasi dan sinkronisasi rencana induk SPBE;
- q. pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO); dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Statistik Dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Statistik dan Persandian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Statistik dan Persandian;

Untuk menjalankan tugas Bidang Statistik dan Persandian menjalankan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Statistik dan Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- d. peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;

- e. pelaksanaan pembangunan metadata statistik sektoral;
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- g. pengembangan infrastruktur statistik sektoral;
- h. penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah;
- i. penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah;
- j. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah;
- k. pelaksanaan pengamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non elektronik; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung secara langsung kepada Kepala Dinas;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- d. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundangan- undangan.
- e. Jabatan fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundangan-undangan.

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 - 1) Pranata Humas Ahli Muda;

- 2) Pranata Humas Ahli Muda.
- d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :
 - 1) Pranata Komputer Ahli Muda;
 - 2) Pranata Komputer Ahli Muda.
- e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi :
 - 1) Sandiman Ahli Muda;
 - 2) Statistisi Ahli Muda.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

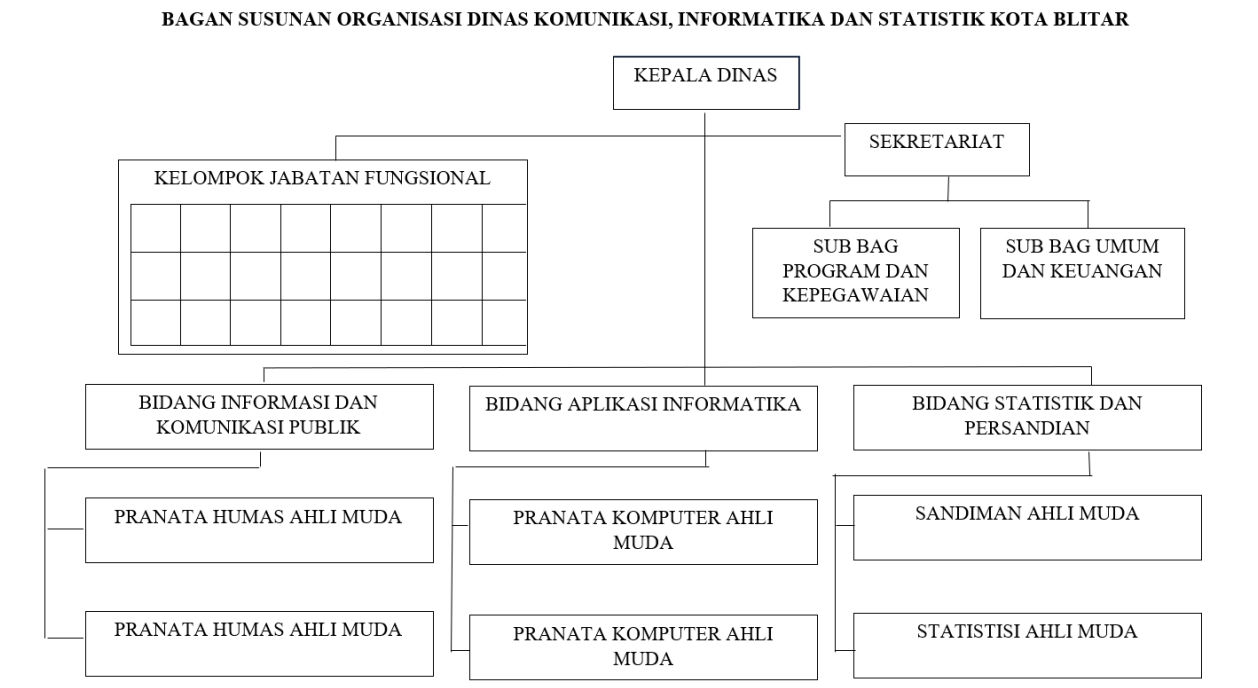
Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik sebagai berikut :

Gambar 2.1

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik berkedudukan di



Jalan. Dr. Moh. Hatta No 05 Kota Blitar, Telepon/ Faksimile (0342) 807805, alamat situs web : <http://diskominfotik.blitarkota.go.id> serta e-mail : diskominfotik@blitarkota.go.id.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik didukung oleh orang

karyawan/ karyawan yang terdiri dari 32 orang PNS, 1 orang PTT, 35 orang Tenaga Harian Lepas.

Data jumlah pegawai Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik berdasarkan eselonisasi, golongan dan tingkat pendidikan adalah sebagaimana gambar 2.2

JUMLAH PEGAWAI , KUALIFIKAS,PENDIDIKANI MENURUT PANGKAT DAN GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI,STRUKTURAL , FUNFGIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Tabel 2.2

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Menurut Pangkat dan Golongan , Tingkat Pendidikan , Pejabat Struktur / Fungsional

No	Pangkat/Golongan , Tingkat Pendidikan dan Pejabat Struktural /Fungsional	Jenis Kelamin (Orang)			Keterangan
		Laki – laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
1.	Pembina Tk. I (IVb)	1	-	1	
2.	Pembina (IV a)	1	1	2	
3.	Penata Tk I (IIId)	5	1	6	
4.	Penata (III/c)	2	1	2	
5.	Penata Muda Tk I (IIIb)		1	1	
6	Penata Muda (IIIa)	3	5	8	
7	Pengatur Tk I (IId)	4	2	6	
8	Pengatur (IIc)	1	2	3	
9	Pengatur Muda Tk I (IIb)	1	-	1	
10	Pengatur Muda (II a)	1			
11	PTT	-	1	1	
	Jumlah	19	14	33	
1	Pasca Sarjana (S2)	3	1	4	
2	Sarjana (S1)	10	5	15	

3	Diploma	1	5	6	
4	SLTA	4	3	7	
5	SLTP	1		1	
6	SD	-	-	-	
	Jumlah	19	14	33	

Dari 33 (Tiga Puluh Tiga) personil tersebut , terbagi dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kota Blitar sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi :
 - 1) Sub bagian Program dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan
- c. Bidang Informasi Komunikasi Publik
 - 1) Pranata Humas Ahli Muda
 - 2) Pranata Humas Ahli Muda
- d. Bidang Aplikasi Informatika
 - 1) Pranata Komputer Ahli Muda
 - 2) Pranata Komputer Ahli Muda
- e. Bidang Statistik dan Persandian
 - 1) Sandiman Ahli Muda
 - 2) Stastisi Ahli Muda
- f. Kelompok jabatan fungsional

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR

2.3.1. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Pengukuran terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik diukur berdasarkan tingkat pencapaian pelayanan dinas dari beberapa sudut pandang penilaian atau standar pelayanan. Adapun standar penilaian yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kinerja pelayanan dari sudut pencapaian terhadap indikator kinerja kunci (IKI); dan
- b. Tingkat kinerja pelayanan dari sudut pencapaian terhadap indikator utama (IKU).

Dari tingkat pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai, dapat dipergunakan sebagai bahan acuan penetapan program kegiatan di masa yang akan datang untuk meningkatkan pencapaian terhadap target-target baik indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama OPD, khususnya bagi pencapaian yang belum mencapai target.

Adapun perhitungan terhadap capaian target Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dimulai pada tahun 2014 dengan kelembagaan lama pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Blitar. Selanjutnya capaian target ini mengalami penyesuaian ketika terjadi perubahan kelembagaan lagi di tahun 2017 sesuai organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Kota Blitar dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2016- 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indikator Tujuan (IKU)																		
	Persentase penerapan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK yang terintegrasi		-		-	27%	31%	42%	36%	-	44,44 %	46,80 %	51,06 %	76,69 %		164,59 %	150,96 %	95,32%	221,36 %
2	Indikator sasaran (IKU)		-																
	Persentase ketersediaan layanan aplikasi e Gov pada OPD		-			26,67 %	31,11 %	35,56 %	40%	-	45,95 %	51,35 %	59,45 %	83,78 %	-	172,29 %	165,06 %	167,18 %	209%
	Persentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik		-			94,05 %	95%	96%	97%	-	99,84 %	98,92 %	99,67 %	100%	-	106,16 %	104,13 %	103%	103%
	Persentase data statistik yang terlayani					70%	75%	80%	80%	-	72,22 %	83,33 %	89%	90%	-	103,17 %	96,29%	111%	112,5%

	melalui e governance																		
	Persentase Informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi					100%	100%	100%	100 %	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%

2.3.2. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

Pengukuran kinerja anggaran dilakukan terhadap tingkat pencapaian/ realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta tingkat pertumbuhan anggaran dan realisasinya. Terkait dengan kelembagaan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2022 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Blitar maka yang akan disajikan pada pengukuran kinerja anggaran ini adalah anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada perangkat daerah .

Berikut disampaikan besaran anggaran, realisasi anggaran, tingkat capaian realisasi dan tingkat pertumbuhan atas anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	NA		894.524.900	2.193.257.300	2.916.671.100	NA		871.505.224	2.071.890.984	2.833.363.383	NA		97,43	94,47	97,14	2.001.484.433	1.925.586.530
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN E-GOVERNANCE	NA		14.247.891.000	19.686.657.892	11.201.331.894	NA		3.780.507.222	14.181.518.450	8.393.714.203,30	NA		26,53	72,04	74,93	2.001.484.433	8.785.246.625
3	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA, INFORMASI DAN STATISTIK DAERAH	NA		520.932.000	533.540.000	452.074.500	NA		513.949.223,00	525.395.000	450.460.300	NA		98,66	98,47	99,64	502.182.167	496.601.508
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI MILIK PEMERINTAH ATAU NEGARA	NA		121.608.700,00	299.158.200	200.530.000	NA		113.668.926,00	267.897.722	200.530.000	NA		93,47	89,54	99,60	207.098.967	277.342.316

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian di daerah, agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang merupakan kekuatan, ancaman, peluang dan kelemahan, baik faktor-faktor pendukung internal maupun faktor eksternal.

Faktor internal dan eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Internal, terdiri dari :

a. Kekuatan

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Kota Blitar di bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;
- 2) Adanya Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 tahun 2013 tentang Pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- 3) Adanya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Blitar;
- 4) Adanya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar;
- 5) Sebagai dinas yang mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan, maka dapat bertindak sebagai pemberi pertimbangan teknis bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian, pada saat ini Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik telah mengembangkan Integrasi Jaringan Intranet ke semua OPD yang didukung dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi berupa jaringan komputer dan Internet/ intranet, serta pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) OPD secara online melalui website dengan alamat www.blitarkota.go.id. Pengembangan lainnya yang telah dilakukan adalah telah tersedianya alamat subdomain masing-masing OPD dalam portal/ situs Pemerintah Kota Blitar serta peningkatan fasilitas publik dengan penyediaan area hot spot (hot spot pro rakyat) di sejumlah titik lokasi untuk koneksi internet bagi masyarakat.

- 6) Tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kota Blitar seperti : Aplikasi Web Mail, Silpusutron, SMS Pengaduan (ULPIM dan PPID), e-transparansi, e-monev, SIP-APBD, LPSE, e-Absensi, SIAP, SIP-PBB.
- 7) Tersedianya Road Map pengembangan pelaksanaan e-Government yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Blitar.
- 8) Ketersediaan dana belanja tidak langsung dan dana lainnya untuk membiayai kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menjalankan tupoksinya.
- 9) Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi pendidikan lulusan S1 dan S2 dan rata - rata menguasai komputer.
- 10) Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang perencanaan dan pengembangan bidang telematika.

b. Kelemahan.

- 1) Sebagian staf masih belum memahami tupoksi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik .
- 2) Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan database, sehingga implementasi e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data statistik yang cepat, tepat dan akurat;
- 3) Pelaksanaan diseminasi informasi publik belum berjalan secara optimal;.

- 4) Kurangnya pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi dan informatika terhadap aparatur pemerintah;
- 5) Kurang kesadaran dari aparatur terhadap arti penting data dan informasi khususnya dalam pengamanan informasi.

2. Faktor Eksternal, adalah;

a. Peluang

- 1) Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 274 yang berbunyi Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada Pasal 120 ayat (1) berbunyi dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai;
- 3) Peningkatan perkembangan Teknologi Informasi baik dari sisi Hardware maupun software dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas aplikasi sistem informasi serta layanan akses internet di masyarakat;
- 4) Semakin meningkatnya kualitas SDM yang mempunyai pengetahuan di bidang IT;
- 5) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi publik.
- 6) Peraturan Walikota Blitar No. 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sertifikat Elektronik Dilingkungan Pemkot Blitar .
- 7) Perwali Blitar No. 49 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemkot Blitar .
- 8) Perwali Blitar No. 10 tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardhika FM Kota Blitar .
- 9) Perwali Blitar No. 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

- 10) Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara No. 10 Tahun 2019 Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemda .
- 11) Peraturan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia .
- 12) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
- 13) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah .

b. Tantangan

- 1) Banyaknya peraturan baru yang harus disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
- 2) Semakin meningkatnya frekwensi gangguan dari hacker dalam mencoba melakukan gangguan terhadap sistem informasi milik Pemerintah;
- 3) Penyediaan akses internet yang semakin mudah dan biaya terjangkau;
- 4) Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik;
- 5) Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai baik penerimaan dari DAU dan PAD yang cenderung semakin menurun.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah hal-hal yang berkaitan dengan organisasi atau berasal dari dalam OPD, sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang berkaitan dengan dinamika nasional, provinsi dan lembaga atau instansi di luar organisasi yang di masa mendatang diperkirakan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran
Pembangunan Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Menjawab permasalahan-permasalahan pada tahun 2020 maka dapat dikemukakan isu- pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	2	3	4
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan.		

	Urusan Komunikasi Informatika		
1.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik belum optimal	Intergrasi aplikasi yang telah dilakukan kota Blitar tidak berjalan setelah terbitnya kebijakan penggunaan Aplikasi Pemerintahan (SIPD) yang dikembangkan pusat	Pemahaman OPD terekait aplikasi generic dan aplikasi khusus
			Belum tersediannya fitur pertukaran data maupun database replikasi untuk aplikasi pemerintahan maupun pelayanan publik milik pusat
			Masih adanya OPD yang mengembangkan aplikasi sejenis yang telah dibuat oleh OPD/ instansi lain
			Belum terwujudnya satu data melalui pengelolaan satu database terpadu untuk seluruh aplikasi
2.	Belum optimalnya keterbukaan informasi publik	Belum optimalnnya peran PPID Utama dan PPID pembantu	PPID Pembantu belum memahami tentang DIPD (Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik) yang bersifat terbuka dan Informasi yang dikecualikan

	Urusan Statistik		
3	Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral	Pelaporan data Statistik OPD belum terpenuhi	Kurangnya kesadaran produsen data OPD akan pentingnya data statistik sektoral
		Pengelolaan data statistik sektoral belum optimal	Belum optimalnya system informasi yang digunakan dalam pengelolaan data statistik
	Urusan Persandian		
4	Potensi terganggunya kerahasiaan (confidentiality, keutuhan (integrity), ketersediaan (availability) keaslian (authenticity) dan kenirsangkalan (non repudiation) informasi dan dokumen pemerintah di lingkungan Pemkot Blitar	Belum optimalnya pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada dokumen kedinasan	Belum adanya Peraturan Walikota Blitar yang mengatur tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik
			Belum adanya sosialisasi /bimtek tentang pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Tabel 3.2

Identifikasi Isu Strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar

No	Isu Strategis			
	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Blitar	Dinas Kominfo dan Statistik
1	Menuju era digitalisasi <i>broadband</i> dari sistem analog	Implementasi <i>e-Government</i> di Jawa Timur belum optimal	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik belum optimal	Terwujudnya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi
2	Keterbukaan informasi	Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi	Belum optimalnya keterbukaan informasi publik	Optimalisasi peranan PPID dan ULPIM serta Peningkatan fungsi KIM dan Telecenter
3	Masalah keamanan Informasi	Lemahnya pengamanan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Potensi ancaman siber informasi layanan pemerintah	Peningkatan kesadaran terhadap keamanan data dan informasi
4	Statistik	Belum Optimalnya penyampaian data dari produsen data karena Belum adanya juknis pengumpulan data, Belum adanya standar pengisian bagi produsen data, dan belum adanya <i>tools</i> untuk penyampaian data <i>via web</i> .	Belum optimalnnya pemanfaatan data statistik sektoral	Peningkatan pemanfaatan data statistik daerah

Berdasarkan hasil identifikasi Isu strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar perlu diperhatikan beberapa hal pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, yaitu :

1. Dalam penyelenggaraan program/ kegiatan, hendaknya berpegangan pada program, karakter masyarakat serta keselarasan dengan program/

kegiatan pada OPD lain sehingga dapat mendukung pelaksanaan visi misi Pemerintah Kota Blitar;

2. Dalam penyelenggaraan program/ kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik harus selaras dengan kebijakan nasional, Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kota Blitar sehingga konektivitas program dari pusat sampai tingkat OPD dapat berjalan optimal.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam penyusunan rencana program kegiatan, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tidak terlepas dari Visi Misi Kota Blitar yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Blitar harus menjadi pedoman dalam pembuatan program/ kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.

Adapun Visi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”

Visi ini merupakan dasar dari semua pembangunan di Kota Blitar, dan juga menjadi target capaian yang menjadi cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 misi yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan ;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren , Berdaya Saing , Sehat Jasmani – Rohani , Cerdas dan Berkarakter ;
3. Mewujudkan Beredukasi secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan perdagangan Berbasis Digital
4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan ;
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi ;

Adapun misi yang diamanatkan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik adalah misi ke-5 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Berbasis Teknologi Informasi ”**.

Mendukung pelaksanaan misi ke-5 tersebut serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka ditetapkan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar adalah **“Meningkatnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”**. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran Rencana Strategis (RENSTRA), yaitu :

1. Meningkatkan sistem keterbukaan informasi publik.
2. Meningkatkan layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK.
3. Meningkatkan pemanfaatan data statistik daerah.
4. Meningkatkan Keamanan informasi

Berpedoman pada visi, misi, RPJMD 2021 – 2026 dan telah lebih lanjut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran rencana strategis, maka sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama.

Dalam mencapai keberhasilan program/ kegiatan tidak terlepas dari faktor penghambat dan pendorong. Faktor-faktor tersebut diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

V I S I				
Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL MAKMUR DAN BERMANFAAT				
	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Infrastruktur TIK yang belum memadai serta Sistem Informasi yang belum terintegrasi	SDM yang kualitas dan kuantitasnya belum memadai Ego sektoral pengembangan integrasi sistem informasi dalam satu sistem/ aplikasi	▪ Kebijakan pengembangan e-government ▪ pengembangan data center

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN RENSTRA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Indonesia Maju yang berdaulat , Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong“.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia ;
2. Struktur ekonomi yang produktif , mandiri , dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan ;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan ;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa ;
6. Penegakan system hokum yang bebas korupsi ,bermartabat dan terpercaya ;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih , efektif , dan terpercaya ;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan ;

Visi dan misi dari Kementerian Komunikasi Dan Informatika dapat dijadikan acuan atau gambaran dalam pencapaian program di daerah. Hal ini mengacu pada penetapan visi dan misi kementerian yang telah didasarkan pada kajian dengan mempertimbangkan karakteristik dan keragaman masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari perkotaan sampai pedesaan serta persebaran sumber daya alam maupun manusia.

3.3.2 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI

Selaras dengan visi dan misi dari Kementerian Komunikasi Dan Informatika serta visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu :

V I S I :

"Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik melalui TIK di Jawa Timur"

M I S I :

- 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
- 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobis/ agroindustri dan industrialisasi;
- 3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang;
- 4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- 5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmonisasi sosial

3.3.3 KETERKAITAN RENSTRA KEMENTERIAN, PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH

Selaras dengan visi dan misi baik di Kementerian Komunikasi Dan Informatika maupun Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur, maka diperlukan sinergitas serta penyesuaian di tingkat Kota Blitar khususnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Adapun kesesuaian dan keselarasan visi misi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Tabel 3.4

Keterkaitan Rencana Strategis Kementerian, Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Blitar Dan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar

No	Rencana Stategis			
	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Blitar	Dinas Kominfo dan Statistik
1	Menuju era digitalisasi broadband dari sistem analog	Implementasi <i>e-Government</i> di Jawa Timur belum optimal	Pengelolaan kearsipan dalam bentuk eGoverment	Terwujudnya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi

2	Keterbuka an informasi	Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi	Kemitraan dan partisipasi masyarakat untuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah	Optimalisasi peranan PPID dan ULPIM serta Peningkatan fungsi KIM dan Telecenter
3	Masalah keamanan Informasi	Pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam penyebaran informasi	Teknologi Informasi mendorong partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Terwujudnya pengembangan data yang akurat dan terjamin keamanannya

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai penentu keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Bila ditinjau dari dari Rencana Tata Ruang Wilayah, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik mempunyai tugas membantu Walikota Blitar melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan.

Dalam menjalankan Program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik mendukung visi ke 5 yaitu “ **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Tehnologi Informasi**”

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pemasangan FO di Kota Blitar	Belum tercakupnya seluruh wilayah dengan FO secara serentak	Adanya pentahapan anggaran pemasangan FO	Kebutuhan jaringan internet untuk e-Gov sangat mendesak
2	Pengaturan pemasangan Menara Telekomunikasi	Kewenangan tidak diserahkan ke daerah	Belum adanya aturan terbaru yang mengatur	Kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi cukup besar

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar.

Penyusunan KLHS RPJMD berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) termuat dalam Rancangan RPJMD Kota Blitar.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS dengan isu strategis Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK dengan salah satu kegiatannya yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah .

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dinas Kominfo dan statistik yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral serta persandian dan keamanan informasi di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan dan kelemahan yang telah dipaparkan maka ke depan dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Pengembangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Blitar menuju terciptanya layanan umum dan administrasi pemerintahan yang sepenuhnya terdigital untuk mewujudkan smart city di Kota Blitar .
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Blitar serta akses layanan internet untuk masyarakat guna mendukung digitalisasi di kota Blitar;

3. Pengembangan pemanfaatan layanan Data center untuk meningkatkan keamanan dan integrasi data serta interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Blitar;
4. Pengembangan penyediaan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik;
5. Pengembangan dan pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ;
6. Pengembangan layanan informasi publik melalui media Pemerintah daerah yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
7. Pengembangan layanan satu data melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik;
8. Pengembangan pelayanan persandian dan keamanan informasi seiring dengan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 4.1.
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN / SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran						
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi akhir
1	2	4	5	9	10	11	12	13	14	
1	TUJUAN : Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	(Bobot x Domain Kebijakan SPBE) + (Bobot x Domain Tata Kelola SPBE) + (Bobot x Layanan SPBE)	2,88	2,31	2,63	2,95	3,20	3,45	3,45
2	SASARAN 1: Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegritasi	Jumlah Layanan publik on line dan terintegritasi Jumlah layanan publik x 100 %	81	89	94	98	100	100	100
3	SASARAN 2: Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	Pemeringkatan monev Keterbukaan informasi publik (Berdasarkan Perki 5 Tahun 2016)	71	81	86	91	96	100	100
4	SASARAN 3: Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD X 100%`	94,83	96	97	98	99	100	100
5	SASARAN 4: Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/ Jumlah area penilaian x 100 %	20,31	38,76	46,51	54,26	62,02	69,77	69,77
6	TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A 83,03	A 84,28	A 85	A 86,25	A 87,5	A 88,75	A 88,75
7	SASARAN : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A 83,03	A 84,28	A 85	A 86,25	A 87,5	A 88,75	A 88,75

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran strategis akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah (Added Value) bagi stakeholder layanan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Gambaran Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disusun oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar pada periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel 5.1

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Daerah Kota Blitar

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai berikut :

V I S I : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
M I S I : 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penguatan tata kelola SPBE	Penguatan dan optimalisasi infrastruktur jaringan TIK
			Peningkatan integrasi aplikasi layanan public

teknologi informasi		Peningkatan sistem keterbukaan informasi publik	Peningkatan kualitas pemerintahan dan layanan publik
			Peningkatan kemudahan akses publik terhadap data dan informasi publik
			Peningkatan pelayanan data pembangunan daerah melalui e governance
		Peningkatan pemanfaatan data Statistik Daerah	Peningkatan integrasi satu data ddengan aplikasi lainnya
			Peningkatan ketersediaan data Statistik Sektoral
		Peningkatan Keamanan Informasi	Peningkatan peran dan kapasitas Gov-CSIRT
			Penyusunan regulasi dan pedoman teknisterkait keamanan informasi

Tabel di atas dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya indikator kinerja yang jelas. Dimana indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Berpedoman pada RPJMD Kota Blitar 2016-2021, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merumuskan Indikator Kinerja yang digunakan sebagai pedoman selama 5 tahun ke depan. Adapun indikator kinerja OPD tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan		TARGET 2022-2026		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Data Awal	2022			
								2020	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	(Bobot x DomainKebijakan SPBE) + (Bobot x Domain Tata Kelola SPBE) + (Bobot x Layanan SPBE)	Indeks	2,88	2,31		Diskominfotik	Kota Blitar
		Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik			Hasil Monev PPID	Pemeringkatan monev Keterbukaan informasi publik (Berdasarkan Perki 5 Tahun 2016)	persen	60	72,6		Diskominfotik	Kota Blitar
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP/jumlah diseminasi dan layanan informasi publik x 100%	persen	75	83%	2.564.813.096	Diskominfotik	Kota Blitar
					Persentase komunitas masyarakat /mitra strategis pemerintahan daerah yang menvebar		persen	20	60%		Diskominfofik	Kota Blitar

					informasi dan kebijakan pemerintah daerah							
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik/ jumlah masyarakat x 100%	persen		34%	2.564.813.096	Diskominfotik	Kota Blitar
				Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah laporan Koordinasi perumusan kebijakan teknis bidang IKP	Jumlah koordinasi perumusan kebijakan teknis bidang IKP yang dilaksanakan pada tahun berjalan	kali		3	27.938.900	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis bidang IKP		dokumen		1			
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Tim Pemantau monitoring opini dan aspirasi publik yang terbentuk	Jumlah tim pemantau monitoring opini dan aspirasi publik yang dilaksanakan pada tahun berjalan	tim		5	16.959.400	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah Isu Publik yang terpantau	Jumlah pemantauan isu publik yang dilaksanakan pada tahun berjalan	informasi		60		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah pendapat Umum yang terhimpun	Jumlah pengumpulan pendapat umum yang dilaksanakan pada tahun berjalan	informasi		144		Diskominfotik	Kota Blitar

				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah tim pemantau monitoring opini dan aspirasi publik yang dilaksanakan pada tahun berjalan	kali		12	6.247.000	Diskominfotik	Kota Blitar
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang diproduksi	Jumlah pemantau isu publik yang dilaksanakan pada tahun berjalan	konten		500	174.116.500	Diskominfor	Kota Blitar
					Jumlah pengadaan sarana untuk pembuatan konten yang dikelola		sarana		5		Diskominfor	Kota Blitar
					Jumlah Sumber daya pemroduksi konten informasi publik yang dibina/difasilitasi		Orang		4		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah dokumen Penyusunan strategi komunikasi publik yang tersusun		Dokumen		1		Diskominfotik	Kota Blitar
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola	Jumlah pengumpulan pendapat umum yang dilaksanakan pada tahun berjalan	orang		11	796.158.900	Diskominfotik	Kota Blitar

					Jumlah Publikasi Media Luar Ruang (Baliho / videotron) yang dikelola		Kali		38		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah Media luar ruang yang dipelihara (rumah baliho		unit		2		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah Publikasi Website resmi yang difasilitasi/dikelola		Informasi		180		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah Publikasi Media sosial yang difasilitasi/dikelola		Kali		180		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah Publikasi cetak (leaflet/poster dll)		kali		40		Diskominfotik	Kota Blitar
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang ditangani	Jumlah permohonan informasi publik,yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Informasi		5		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik		Sengketa		1		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah pengaduan masyarakat (ULPIM, LAPOR SP4N dan Call Center 112) yang tertangani		Pengaduan		120	609.320.700	Diskominfotik	Kota Blitar

				Layanan Hubungan Media	Jumla Kerjasama Pemberitaan/penyampaian informasi dengan Media Massa	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Kali		995	767.795.996	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah siaran pers yang terlaksana		Kali		5		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah konferensi pers yang terlaksana		Kali		1		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah laporan pemantau siaran pers di media		dokumen		1		Diskominfotik	Kota Blitar
				Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah KIM yang dibina	Jumlah pengaduan yang tertangani-operasional pelayanan pengaduan masyarakat(ULPIM,LAP OR SP4N dan call center 112) yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Kelompok		12	130.622.500	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah Pertura yang di publikasikan		Kali		2		Diskominfotik	Kota Blitar

					jumlah komunitas dan kelompok strategis yang dibina		kelompok		21		Diskominfotik	Kota Blitar
				Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Tim Komunikasi krisis,	Jumlah tim komunikasi krisis,yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Tim		1	11.694.300	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah dokumen SOP penanganan krisis yang disusun	Penyusunan SOP penanganan krisis,yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Dokumen		1		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah komunikasi krisis yang ditangani	Penanganan komunikasi krisis yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Kali		1		Diskominfotik	Kota Blitar
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah peserta lokakarya/ webinar/bimtek pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada tahun berjalan	orang		30	5.636.300	Diskominfotik	Kota Blitar

				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah BAKOHUMAS yang di bina		unit		80	18.322.600	Diskominfotik	Kota Blitar
		Meningkatnya Layanan SPBE Melalui Kebijakan dan Tata Kelola TIK			Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Indeks domain layanan SPBE	Indeks	3,39	3,91		Diskominfotik	Kota Blitar
				Program aplikasi informatika	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	Rata rata persentase jaringan infrastruktur yang tersambung + persentase layanan spbe yang terintegrasi	persen	45,6 9	86,35 %	7.213.911.948	Diskominfotik	Kota Blitar
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	Jumlah domain go.id/sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public yang sesuai dengan perwali TIK			100%	6.033.779.702	Diskominfotik	Kota Blitar
				Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kota	Jumlah Domain Pemerintah Kota yang di kelola	Jumlah domain pemerintah kota	domain		6	21.000.000	Diskominfotik	Kota Blitar

					Jumlah sewa domain yang dibayar	Langganan sewa domain yang dilaksanakan setiap bulan	domain		12		Diskominfotik	Kota Blitar
				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Jumlah Lisensi Kontrol Panel Web Hosting	Jumlah IP cpanel yang tersedia	lisensi		2	56.307.600	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah peserta Sosialisasi Penggunaan Nama Domain Sesuai Ketentuan		orang		50		Diskominfotik	Kota Blitar
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik yang terhubung jaringan intra pemerintah	Jumlah titik yang terhubung jaringan intra pemerintah	Titik		60	5.986.472.102	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah hotspot area publik yang dipelihara	Jumlah fasilitas hotspot yang terpelihara	Titik		50		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah Fasilitas Jaringan publik (Hotspot RT dan Tempat umum)	Jumlah fasilitas jaringan public(hotspot RT dan tempat umum) yang terpasang	Bulan		12		Diskominfotik	Kota Blitar

					Jumlah bandwidth internet	Jumlah sewa bandwidth internet	Bulan		12		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah Lisensi Firewall	Jumlah sewa lisensi firewall	bulan		12		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah Sarana Prasarana jaringan intra pemerintah yang di kelola	Jumlah sarana prasarana jaringan intra pemerintah daerah	Jenis		10		Diskominfotik	Kota Blitar
				Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layananan publik	Jumlah aplikasi pemerintahan dan layanan public yang tersedia/jumlah kebutuhan aplikasi pemerintahan dan layanan publik	persen		90,50 %	1.180.132.246	Diskominfotik	Kota Blitar
				Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen kebijakan, dan penerapan standar teknis penyelenggaraan sistem elektronik pemda yang tersusun	Jumlah dokumen kebijakan dan standar teknis tersusun	Dokumen		1	81.758.700	Diskominfotik	Kota Blitar

					Jumlah laporan monev SPBE yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi monev SPBE	dokumen		1		Diskominfotik	Kota Blitar
				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen Rencana Induk SPBE/TIK yang disusun/direvisi	Jumlah dokumen rencana induk spbe disusun/direview	Dokumen		0	1944000	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah laporan evaluasi/ review berkala rencana induk SPBE /TIK yang dilaksanakan		dokumen		1		Diskominfotik	Kota Blitar
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah infrastruktur pusat data daerah sesuai standar nasional	Jumlah penyediaan infrastruktur pusat data	Buah		1	56.000.000	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah laporan koordinasi pemanfaatan pusat data daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pemanfaatan pusat data daerah	dokumen		1		Diskominfotik	Kota Blitar

					Jumlah kerjasama dan fasilitas pengelolaan data elektronik berbagi pakai tingkat kota, provinsi dan pusat	Jumlah kegiatan koordinasi pemanfaatan pusat data daerah	Instansi		4		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah aplikasi monitoring pusat data yang di kembangkan	Jumlah pengembangan aplikasi monitoring keamanan terbangun	Aplikasi		0		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah dokumen rencana keberlangsungan dan pemulihan layanan pusat data yang disusun	Jumlah pengembangan aplikasi monitoring keamanan terbangun	Dokumen		1	48.785.800	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah perangkat Komunikasi berbasis suara (VOIP) dan video yang di kelola		Paket		60		Diskominfotik	Kota Blitar
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sarana Komunikasi berbasis video		Peket			710.192.176	Diskominfotik	Kota Blitar

					Jumlah email resmi @mail.go.id yang di kelola		Alamat		3		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah sarana cloud meeting berbasis suara dan video yang tersedia		Paket		1		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah CCTV lingkungan tersedia		unit		300		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah pemeliharaan CCTV lingkungan		Bulan		12		Diskominfotik	Kota Blitar
				Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Standar Keamanan Sistem Informasi tersusun		dokumen			-	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah layanan pemerintah /publik yang menggunakan sertifikat elektronik .	Jumlah layanan aplikasi yang menggunakan sertifikat elektronik	Layanan		-		Diskominfotik	Kota Blitar

					Jumlah aplikasi layanan yang menggunakan tandatangan elektronik .		Aplikasi					Diskominfotik	Kota Blitar
				Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek Pengelolaan situs Website/ Aplikasi dilaksanakan		orang		81	9.361.000	Diskominfotik	Kota Blitar	
					Jumlah konten dan situs web perangkat daerah yang difasilitasi		buah		0		Diskominfotik	Kota Blitar	
					Jumlah pengembangan situs web perangkat daerah yang difasilitasi		Aplikasi		0		Diskominfotik	Kota Blitar	
					Jumlah dokumen arsitektur SPBE disusun /direvie	Jumlah dokumen arsitektus SPBE disusun/direview	Dokumen		-		Diskominfotik	Kota Blitar	

					Jumlah tata kelola dokumen elektronik sesuai kebijakan satu data yang terintegrasi yang difasilitasi		Dokumen				Diskominfotik	Kota Blitar
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dibangun/dikembangkan sesuai standar teknis dan keamanan	Jumlah aplikasi dibangun/dikembangkan sesuai standar teknis dan keamanan	Aplikasi		6	500.248.270	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah sumber kode sumber (source code) aplikasi perangkat daerah tersimpan dalam pusat aplikasi (repository)	Jumlah aplikasi dibangun /dikembangkan sesuai standar teknis dan keamanan	Aplikasi		2		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah dokumen kajian biaya dan manfaat pengembangan aplikasi daerah (aplikasi khusus)	Jumlah aplikasi dibangun/dikembangkan sesuai teknis dan keamanan	Dokumen		0		Diskominfotik	Kota Blitar

					Jumlah dokumen laporan pemanfaatan aplikasi umum		Dokumen		1		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah dokumen proses bisnis layanan pemerintah berbasis elektronik disusun/direview	Jumlah dokumen proses bisnis layanan pemerintah berbasis elektronik disusun/direview	Dokumen		0		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah peserta sosialisasi penggunaan aplikasi layanan publik dan pemerintahan	Jumlah sosialisasi penggunaan aplikasi layanan public dan pemerintahan	orang		40		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah bidang pelayanan aplikasi blitar in hand yang dibangun		aplikasi		1		Diskominfotik	Kota Blitar
				Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan cloud server di kelola	Jumlah layanan cloud server	Server				Diskominfotik	Kota Blitar

					Jumlah aplikasi tersambung dalam sistem penghubung layanan (webservices)	Jumlah dokumen system penghubung layanan disusun /direview	buah		0		Diskominfotik	Kota Blitar
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen kebijakan, dan tata kelola smart city yangndisusn/direvie w		Dokumen		0	4.316.000	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah laporan koordinasi fasilitasi keterhubungan data dan informasi	Jumlah koordinasi fasilitasi keterhubungan data dan informasi	Dokumen		1		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah sarana prasarana pendukung kota cerdas yang tersedia	Jumlah koordinasi fasilitasi keterhubungan data	Buah		0		Diskominfotik	Kota Blitar

					Jumlah SDM pendukung kota cerdas yang di bina	Peningkatan kapasitas SDM	orang		0		Diskominfotik	Kota Blitar
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan aset dan penggunaan TIK yang dibangun/dikembangkan	Jumlah aplikasi pengelolaan aset dan layanan TIK dibangun/dikembangkan	Aplikasi		0	86.367.500	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah peserta pelatihan dan bimtek TIK		Orang		21		Diskominfotik	Kota Blitar
				Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	Jumlah sistem elektronik (aplikasi) pemdayang terdaftar	Jumlah system elektronik (aplikasi) pemda yang terdaftar	Aplikasi		20	39948700	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah ASN yang berkompeten dalam monev /assesment TI	Jumlah ASN berkompeten dalam monev/assesment TI	orang		2		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah dokumen GCIO yang tersusun	Jumlah dokumen dan tim GCIO terbentuk	dokumen		1		Diskominfotik	Kota Blitar

					Jumlah tim GCIO yang terbentuk		tim	1			Diskominfotik	Kota Blitar
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD X 100%	persen	94,83	96		Diskominfotik	Kota Blitar
				Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	Jumlah elemen data yang dipublikasikan menggunakan system informasi/jumlah elemen data keseluruhan X 100%	persen	NA	93,43 %	427.353.510	Diskominfotik	Kota Blitar
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah usulan survey statistic sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS/jumlah usulan survey statistic sektoral x 100%	persen		100%	350.971.000	Diskominfotik	Kota Blitar
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Analisa data Satatistik yang tersusun	Jumlah dokumen analisa data statistik yang dilaksanakan pada tahun berjalan	dokumen		3	350.971.000	Diskominfotik	Kota Blitar

					Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilaksanakan pada tahun berjalan	OPD		1		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah Dokumen Profil Daerah Kota Blitar yang tersusun	Jumlah dokumen profil daerah kota blitar yang dilaksanakan pada tahun berjalan	dokumen		1		Diskominfotik	Kota Blitar
					Presentase kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah kompilasi statistic sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS yang dilaksanakan pada tahun berjalan	persen		100%	76.382.510	Diskominfotik	Kota Blitar
				Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Data yang terintegrasi dengan sistem Satu data	Jumlah data yang terintegrasi dengan sistem satu data yang dilaksanakan pada tahun berjalan	data		10	18.631.710	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah tim Pengelola Satu Data di Kota Blitar yang terbentuk	Terwujudnya tim pengelola satu data di kota blitar yang dilaksanakan pada tahun berjalan	kali		4		Diskominfotik	Kota Blitar

				Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah laporan Koordinasi pembangunan metadata statistik sektoral	Jumlah koordinasi pembangunan metadata statistic sektoral yang dilaksanakan pada tahun berjalan	OPD		4	25.000.000	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah dokumen metadata statistik sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dilaksanakan pada tahun berjalan	data		4		Diskominfotik	Kota Blitar
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah laporan Koordinasi dengan pemaangku kepentingan	Jumlah koordinasi dengan pemangku kepentingan yang dilaksanakan pada tahun berjalan	kali		4	3.288.000	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah peserta Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral yang dilaksanakan pada tahun berjalan	orang		4		Diskominfotik	Kota Blitar

				Pengembangan Infrastruktur	Jumlah sarana dan prasara pendukung operasional penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah sarana dan prasarana pendukung operasional penyelenggaraan statistic sektoral yang dilaksanakan pada tahun berjalan	menu		1	25.000.000	Diskominfotik	Kota Blitar
				Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Dokumen otorisasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen otorisasi data statistic sektoral yang dilaksanakan pada tahun berjalan	OPD		10	4.462.800	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah Rekom dari BPS yang ditindaklanjuti	Jumlah rekom dari BPS yang dilaksanakan pada tahun berjalan	kali		10		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah laporan koordinasi Pengambilan keputusan terkait data statistik sektoral		Dokumen		4		Diskominfotik	Kota Blitar
		Meningkatnya Keamanan Informasi			Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/Jumlah area penilaian x 100 %	Indeks	20,31	38,76	358.315.580	Diskominfotik	Kota Blitar

				Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		persen	38,76 %	230.219.540	Diskominfotik	Kota Blitar
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	Jumlah OPD yang memanfaatkan sertifikat elektronik pada persuratan / sitem elektronik dibandingkan dengan jumlah seluruh OPD				Diskominfotik	Kota Blitar
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana strategis Informasi yang disusun	Jumlah dokumen rencana strategis pengamanan informasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	dokumen	1	123.773.640	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah peraturan tentang kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi yang tersusun	Jumlah peraturan tentang kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	buah	2		Diskominfotik	Kota Blitar

					Jumlah standar operasional prosedur (SOP) tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi yang tersusun	Jumlah standar operasional prosedur (SOP) tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	buah		3		Diskominfo	Kota Blitar
					Jumlah laporan sosialisasi tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi	Jumlah koordinasi / sosialisasi tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	dokumen		2		Diskominfo	Kota Blitar
					Jumlah peserta sosialisasi tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi		orang		80		Diskominfo	Kota Blitar
				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang tersusun	Jumlah dokumen analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	dokumen		1	51.442.820	Diskominfo	Kota Blitar

					Jumlah peserta Pengembangan kompetensi sumber daya keamanan informasi	Jumlah Pengembangan kompetensi sumber daya keamanan informasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	orang		120		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah penyediaan peralatan pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia	Jumlah penyediaan pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	unit		2		Diskominfotik	Kota Blitar
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan audit keamanan informasi dan sistem aplikasi secara berkala	Jumlah audit keamanan informasi dan sistem aplikasi secara berkala yang dilaksanakan pada tahun berjalan	dokumen		1		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah laporan koordinasi, identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi	Jumlah koordinasi, identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	dokumen		1	35.782.340	Diskominfotik	Kota Blitar

					Jumlah pengguna layanan pengajuan sertifikat elektronik	Jumlah layanan pengajuan sertifikat elektronik yang dilaksanakan pada tahun berjalan	orang		48		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah peserta koordinasi, sosialisasi pengamanan informasi non elektronik	Jumlah koordinasi, sosialisasi pengamanan informasi non elektronik yang dilaksanakan pada tahun berjalan	orang		40		Diskominfotik	Kota Blitar
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Keamanan Informasi yang tersedia	Jumlah Penyediaan Layanan Keamanan Informasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	kali		1	19.220.740	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah pengguna layanan keamanan informasi	Jumlah pengguna layanan keamanan informasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	orang		48		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah laporan koordinasi, dan evaluasi layanan keamanan informasi		dokumen		1		Diskominfotik	Kota Blitar

					Jumlah peserta sosialisasi layanan keamanan informasi	Jumlah koordinasi, sosialisasi dan evaluasi layanan keamanan informasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	orang		40		Diskominfotik	Kota Blitar
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	persen		25%	128.096.040	Diskominfotik	Kota Blitar
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi, dan evaluasi jaring komunikasi sandi	Jumlah koordinasi, sosialisasi dan evaluasi jaring komunikasi sandi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	dokumen		1	128.096.040	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah peserta sosialisasi jaring komunikasi sandi	Jumlah layanan jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah yang dilaksanakan pada tahun berjalan	orang		40		Diskominfotik	Kota Blitar

					Jumlah layanan jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah yang di kelola	Jumlah layanan jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah yang dilaksanabun pada tahun berjalan	buah		1		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah layanan jaring komunikasi sandi internal perangkat daerah yang di kelola	Jumlah layanan jaring komunikasi sandi internal perangkat daerah yang dilaksanabun pada tahun berjalan	buah		1		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah layanan jaring komunikasi sandi pimpinan daerah yang di kelola	Jumlah layanan jaring komunikasi sandi pimpinan daerah yang dilaksanabun pada tahun berjalan	buah		1		Diskominfotik	Kota Blitar
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	Nilai	A (83,03)	A (84,28)		Diskominfotik	Kota Blitar
		Meningkatnya Kinerja Perangakat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen IKM yang disusun / dokumen x 100%	Indeks	Baik	84	6.884.694.624	Diskominfotik	Kota Blitar

				Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%	persen		100%	41.668.300	Diskominfotik	Kota Blitar
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renstra , PK, IKU , IKI , SOP, SPP Renaksi, Renja , DPA, PRKA, DPPA)	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat Daerah yang tersusun dilaksanakan pada tahun berjalan	jenis		11	16.668.300	Diskominfotik	Kota Blitar
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat Daerah yang tersusun (LKJiP, LKPJ, LPPD , SKM, Evaluasi RKPD , Pengukuran Kinerja Tibulanan)	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat Daerah yang tersusun dilaksanakan pada tahun berjalan	jenis		7	25.000.000	Diskominfotik	Kota Blitar
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ZI	Jumlah dokumen Zona Integritas yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Jenis		1	10.000.000	Diskominfotik	Kota Blitar
				Administrasi Keuangan Perangkat Dearah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	persen		100%	4.137.162.900	Diskominfotik	Kota Blitar

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan pada tahun berjalan	jenis		2	4.129.463.000	Diskominfotik	Kota Blitar
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran	Jumlah jenis laporan Keuangan yang disusun	Jumlah jenis laporan Keuangan yang disusun pada tahun berjalan	laporan		4	7.699.900	Diskominfotik	Kota Blitar
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%	persen		100%	1.283.354.100	Diskominfotik	Kota Blitar
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang terpenuhi	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya /jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	stel		51	25.304.000	Diskominfotik	Kota Blitar
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun berjalan	event		4	1.258.050.100	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah konten pada baliho	Jumlah konten pada baliho yang terpasang pada tahun berjalan	kali		50		Diskominfotik	Kota Blitar

					Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun berjalan	orang		34		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah pembuatan video pendek	Jumlah pembuatan video pendek yang dilaksanakan pada tahun berjalan	paket		2		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat Daerah	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat Daerah	publikasi		4		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah sosialisasi melalui media cetak	Jumlah sosialisasi melalui media cetak yang dilaksanakan di tahun berjalan	kali		20		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah sosialisasi melalui media elektronik	Jumlah sosialisasi melalui media elektronik yang dilaksanakan tahun berjalan	kali		80		Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah sosialisasi tatap muka	Jumlah sosialisasi tatap muka yang dilaksanakan pada tahun berjalan	kali		2		Diskominfotik	Kota Blitar
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%	persen		100%	374.935.724	Diskominfotik	Kota Blitar

				Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang disediakan pada tahun berjalan	jenis		16	16.990.000	Diskominfotik	Kota Blitar
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun berjalan	jenis		20	32.349.324	Diskominfotik	Kota Blitar
				Penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah dos/kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos/kotak/porsi makanan dan minuman yang disediakan pada tahun berjalan	dos		1500	89.896.400	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun berjalan	jenis		26		Diskominfotik	Kota Blitar
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia pada tahun berjalan	jenis		6	13.850.000	Diskominfotik	Kota Blitar

					Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan yang diadakan pada tahun berjalan	lembar		14.00 0		Diskominfotik	Kota Blitar
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang terlaksana pada tahun berjalan	eksempla r		3	9.750.000	Diskominfotik	Kota Blitar
				Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang tercukupi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Rapat Koordina si		37	212.100.000	Diskominfotik	Kota Blitar
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	persen		100%	408.610.000	Diskominfotik	Kota Blitar
				Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayarkan (termasuk listrik,air,telpon,interne t)	Jumlah rekening listrik yang terbayarkan pada tahun berjalan	rekening		4	408.610.000	Diskominfotik	Kota Blitar

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	persen		100%	338.963.600	Diskominfotik	Kota Blitar
				Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Permeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara pada tahun berjalan	unit		8	121.602.800	Diskominfotik	Kota Blitar
					Jumlah kendaraan dinas yabg terbayarkan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yabg terbayarkan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada tahun yang berjalan	unit		8		Diskominfotik	Kota Blitar
				Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara (termasuk komputer,laptop, PC, printer Scanner , Kamera , Mesin Fax)	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara pada tahun berjalan	jenis		8	49.380.800	Diskominfotik	Kota Blitar

				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara yang dilaksanakan pada tahun berjalan	unit		2	101.130.000	Diskominfotik	Kota Blitar
				Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan,kipas angin yang menempel di dinding , Mebelair)	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dilaksanakan pada tahun berjalan	jenis		6	66.850.000	Diskominfotik	Kota Blitar
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia / jumlah BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan x 100%	persen		100%	150.000.000	Diskominfotik	Kota Blitar
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah jenis pengadaan Sarana prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	Jumlah jenis pengadaan Sarana prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia dilaksanakan pada tahun berjalan	jenis		7	150.000.000	Diskominfotik	Kota Blitar

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026
Hasil Pemetaan Kepmendagri No. 50-5889 Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional /Formulasi Penghitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
								2023		2024		2025		2026		K	Rp			K	Rp	K	Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	(Bobot x DomainKebijakan SPBE) + (Bobot x Domain Tata Kelola SPBE) + (Bobot x Layanan SPBE)	2,88	Indeks	2,63		2,95		3,2		3,45		3,45		Diskominfo	Kota Blitar				

		Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik		Hasil Monev PPID	Pemeringkatan monev Keterbukaan informasi publik (Berdasarkan Perki 5 Tahun 2016)	60	Person	78,9		85,2		91,5		98		98		Diskominfotik	Kota Blitar
			Program Informasi dan komunikasi publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang ditetapkan		75	person	85	2.693.053.751	90	2.827.706.438	95	2.969.091.760	100	3.093.906.654	100	11.583.758.603	Diskominfotik	Kota Blitar
				Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah		20		70		80		90		100		100		Diskominfotik	Kota Blitar

			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik/ jumlah masyarakat x 100%			45,5 %	2.693.053.751	0,57	2.827.706.438	68,50 %	2969091760	0,89	3.093.906.654	0,89	11.583.758.603	Diskominfotik	Kota Blitar
			Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		dokumen	2	29.335.845	2	30.802.637	2	32.342.769	2	33.959.908	2	126.441.159	Diskominfotik	Kota Blitar
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		dokumen	4	17.220.910	4	18.081.956	4	18.697.739	4	19.632.625	4	73.633.230	Diskominfotik	Kota Blitar

			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		doku men	12	6.559.350	12	6.887.318	12	7.231.683	12	7.593.268	12	28.271.619	Diskominfotik	Kota Blitar
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaa n Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaa n Media Komunikasi Publik		doku men	510	182.822.325	520	191.963.441	520	201.561.613	530	210.000.000	530	786.347.379	Diskominfotik	Kota Blitar
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasny a	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasny a		Oran g	30	14.100.522	4	14.805.522	5	14.805.522	5	14.805.522	5	58.517.088	Diskominfotik	Kota Blitar
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media		doku men	11	835.966.845	11	877.765.187	11	921.653.447	11	967.736.119	11	3.603.121.598	Diskominfotik	Kota Blitar

				Komunikasi Publik	Komunikasi Publik														
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		dokumen	5	639.786.735	12	671.776.072	12	705.364.875	12	705.364.875	12	2.722.292.557	Diskominfotik	kota Blitar
			Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media		layan an	1000	806.185.796	1100	846.495.086	1150	888.819.840	1300	933.260.832	1300	3.474.761.554	Diskominfotik	kota Blitar
			Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendisemin asikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendisemin asikan Informasi Program atau Kebijakan		dokumen	1	137.153.625	1	144.011.306	1	151.211.872	1	158.772.465	1	584.291.587	Diskominfotik	kota Blitar

			Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis		dokumen	1	12.279.015	1	12.892.966	1	13.537.614	1	14.214.495	1	52.924.090	Diskominfo	kota Blitar
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya		orang	30	5.918.115	30	6.214.021	30	6.524.722	30	6.850.958	40	25.507.816	Diskominfo	kota Blitar
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		dokumen	80	19.238.730	80	20.200.667	80	21.210.700	80	22.271.235	80	82.921.332	Diskominfo	kota Blitar
		Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK		Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Indeks domain layanan SPBE	3,39	Indeks	4,17		4,43		4,69	5		5			Diskominfo	Kota Blitar

			Program aplikasi informatika	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	Rata rata persentase jaringan infrastruktur yang tersambung + persentase layanan spbe yang terintegrasi	45,69	Perse n	90		92, 89	8.288.199.022	95		100	9.290.512.776	100	34.396.659.909	Diskominfotik	kota Blitar		
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan				100	6.337.534.067	100	6.656.682.688	100		100	7.344.365.750	100	27.330.598.438	Diskominfotik	kota Blitar		
			Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota		doma in	6	21.300.000	6	21.615.000	6		6	21.945.750	6	22.293.038	6	87.153.788	Diskominfotik	kota Blitar

			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		dokumen	1	60.438.360	2	64.982.196	2	79.080.416	2	75.478.457	2	279.979.429	Diskominfo	kota Blitar
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		unit	3	6.285.795.707	20	6.600.085.492	20	6.930.089.767	20	7.276.594.255	20	26.778.275.436	Diskominfo	kota Blitar
			Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik	Jumlah aplikasi pemerintahan dan layanan public yang tersedia/jumlah kebutuhan aplikasi pemerintahan dan layanan publik x 100%			0,93	1.721.279.152	0,96	1.631.516.334	0,98	1.767.118.959	1	1.946.147.026	1	7.066.061.471	Diskominfo	kota Blitar

			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Dokumen	1	72.096.635	1	57.451.467	1	87.842.040	1	91.215.242	1	308.605.384	Diskominfo	kota Blitar
			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		dokumen	1	77.041.200	1	2.143.260	1	81.000.423	1	2.362.944	1	162.547.827	Diskominfo	kota Blitar
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		unit	1	181.210.000	1	58.205.000	1	67.000.000	1	193.000.000	1	499.415.000	Diskominfo	kota Blitar

			Penyelenggar aan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		doku men	1	748.000.000	1	784.000.000	1	824.000.000	1	868.000.000	1	3.224.000.000	Diskominfo	kota Blitar
			Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		doku men	2	270.063.600	3	150.000.000	3	50.000.000	3	205.000.000	3	675.063.600	Diskominfo	kota Blitar
			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		peran gkat daera h	1	70.000.000	1	211.000.000	1	22.050.000	1	178152500	1	481.202.500	Diskominfo	kota Blitar

			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		unit	2	682.860.684	2	604.753.218	2	635.700.404	2	716.740.974	2	2.640.055.280	Diskominfo	kota Blitar
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		layanan	1	12.000.000	2	100.000.000	2	25.000.000	2	65.000.000	2	202.000.000	Diskominfo	kota Blitar
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		Dokumen	1	22.500.000	2	857.500.000	2	31.537.000	2	87.364.375	2	1E+09	Diskominfo	kota Blitar

			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		dokumen	1	269.739.740	1	244.176.727	1	308.085.563	1	268.486.842	1	1.090.488.872	Diskominfo	kota Blitar
			Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		dokumen	1	1.717.062	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	1	7.117.062	Diskominfo	kota Blitar
		Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD X 100%`	94,83	Persen	97		98		99		100		100		Diskominfo	kota Blitar

			Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik		NA	Person	95,07	505.201.636	96,71	534.211.717	98,31	563.422.303	100	592.843.418	100	2.195.679.074	Diskominfo	kota Blitar
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah usulan survey statistic sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS/jumlah usulan survey statistic sektoral x 100%			1	425.000.000	1	450.000.000	1	475.000.000	1	500.000.000	1	1.850.000.000	Diskominfo	kota Blitar
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		dokumen	5	425.000.000	3	450.000.000	3	475.000.000	3	500.000.000	3	1.850.000.000	Diskominfo	kota Blitar

			Sektoral di Daerah	yang Dihimpun	yang Dihimpun															
		Meningkatnya Keamanan informasi		Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/ Jumlah area penilaian x 100 %	20,31	Indeks	46,51		54,26		62,02		69,77		69,77			Diskominfo	kota Blitar
			Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		20,31	persen	46,51	376.231.359	64,26	395.042.927	62,02	414.795.073	69,77	435.534.827	69,77	1.621.604.186		Diskominfo	kota Blitar
			Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	Jumlah OPD yang memanfaatkan sertifikat elektronik pada persuratan / sitem elektronik dibandingkan dengan jumlah seluruh OPD			46,51 %	241.730.517	54,26 %	253.817.043	620,25	266.507.895	60,77 %	279.833.290	60,77 %	1041888745		Diskominfo	kota Blitar

			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		doku men	1	129.962.322	1	136.460.438	1	143.283.460	1	150.447.633	1	560.153.853	Diskominfotik	kota Blitar
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		lapor an	6	54.014.961	4	56.715.709	4	59.551.495	4	62.529.069	4	232.811.234	Diskominfotik	kota Blitar
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik		lapor an	3	37.571.457	2	39.450.030	2	41.422.531	2	43.493.658	2	161.937.676	Diskominfotik	kota Blitar

				dan Non Elektronik	dan Non Elektronik														
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		perangkat daerah	20	20.181.777	20	21.190.866	21	22.250.409	21	23.362.930	3	86.985.982	Diskominfo	kota Blitar
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi yang dilaksanakan pada tahun berjalan			0,35		0,5	141.225.884	0,75		1	155.701.537	1	579.715.441	Diskominfo	kota Blitar
			Operasionalisasi Jaringan komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi			20	134.500.842	40	141.225.884	40	148.287.178	40	148.287.178	40	572.301.082	Diskominfo	kota Blitar
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektoral Daerah	A (83,03)	Nilai	A (85)		A (86,25)		A (87,5)		A (88,75)		A (88,75)			

					Kota Blitar														
		Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen IKM yang disusun / dokumen x 100%	Baik	Indeks	Baik (79-84)	562.945.153.801	Baik (79-84)	562.001.354.642	Baik (79-84)	582.661.734.525	Baik (79-84)	605.829.181.733	Baik (79-84)	2.313.437.424.701	Diskominfotik	kota Blitar
			Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%			1	43.751.715	1	45.939.301	1	48.236.266	1	50.648.079	1	188.575.361	Diskominfotik	kota Blitar
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen	11	17.501.715	11	18.376.801	11		11	20.260.423	11	75434580	Diskominfotik	Diskominfotik

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan	7	26.250.000	7	27.562.500	7	28.940.625	7	30.387.656	7	113.140.781	Diskominfo	kota Blitar
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan	1	10.500.000	1	1.100.000	1	11.500.000	1	11.500.000	1	34.600.000	Diskominfo	kota Blitar
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%			1	4.344.021.045	1	4.561.222.097	1	4.789.283.202	1	5.028.747.362	1	18.723.273.706	Diskominfo	kota Blitar

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		laporan	13	4.335.936.150	13	4.552.732.958	13	4.780.369.605	13	5.019.388.086	13	18.688.426.799	Diskominfo	kota Blitar
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		laporan	4	8.084.895	4	8.489.140	4	8.913.597	4	9.359.277	4	34.846.909	Diskominfo	kota Blitar
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%			1	1.347.521.805	1	1.414.897.895	1	1.485.642.790	1	1.559.924.930	1	5.807.987.420	Diskominfo	kota Blitar

			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket	68	26.569.300	65	27.897.660	65	29.292.543	51	30.757.170	51	114.516.673	Diskominfotik	kota Blitar
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	50	1.320.952.605	100	1.387.000.235	100	1.456.350.247	100	1.529.167.759	100	5.693.470.846	Diskominfotik	kota Blitar
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%		Person	1	393.682.510	1	413.366.636	1	434.034.967	1	455.736.716	1	1.696.820.829	Diskominfotik	kota Blitar
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		paket	4	17.839.500	4	18.731.475	4	19.668.049	4	20.651.451	4	76.890.475	Diskominfotik	kota Blitar

				yang Disediakan	yang Disediakan														
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan		paket	3	11.000.000	3	11.000.000	3	11.000.000	3	11.000.000	3	44.000.000	Diskominfotik	kota Blitar
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		paket	5	33.966.790	5	35.665.130	5	37.448.386	5	39.320.806	19	146.401.112	Diskominfotik	kota Blitar
			Penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	36	83.391.220	36	88.110.781	36	93.066.320	36	98.269.636	36	362.837.957	Diskominfotik	kota Blitar

			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	1	14.542.500	1	15.269.625	1	16.033.106	6	16.834.762	6	62.679.993	Diskominfotik	kota Blitar
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		doku men	24	10.237.500	24	10.749.375	24	11.286.844	24	11.851.186	3	44.124.905	Diskominfotik	kota Blitar
			Penyelenggaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		lapor an	36	222.705.000	36	233.840.250	36	245.532.263	37	257.808.876	37	959.886.389	Diskominfotik	Diskominfotik
								1		1	45	1		1	49	1	1.849	Dis ko mi ko ta	

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	Jml penunjang urusan pemerintah an daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintah an x 100%														
			Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		lapor an	36	429.040.500	36	450.492.525	36	473.017.151	36	496.668.009	36	1.849.218.185	Diskominfotik	kota Blitar
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		lapor an	13	232.050.000	13	250.000.000	13	250.000.000	13	250.000.000	13	982.050.000	Diskominfotik	kota Blitar
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	Jml penunjang urusan pemerintah an daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan			1	355.911.780	1	373.707.369	1	392.392.737	1	412.012.374	1	1.534.024.260	Diskominfotik	kota Blitar

					pemerintah an x 100%														
			Penyediaan jasa Pemeliharaaa n , Biaya Permeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit	8	127.682.940	8	134.067.087	8	140.770.441	8	147.808.963	8	550.329.431	Diskominfotik	kota Blitar
					Jumlah kendaraan dinas yabg terbayarkan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada tahun yang berjalan		unit	8		8		8		8		8			

			Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	8	34.234.700	9	40.000.000	8	40.000.000	9	40.000.000	9	154.234.700	Diskominfotik	kota Blitar
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi		unit	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	310.000.000	Diskominfotik	kota Blitar
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi		unit	2	70.192.500	2	73.702.125	2	77.387.231	2	81.256.593	2	238.985.226	Diskominfotik	kota Blitar
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia / jumlah BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan x 100%			1	1.125.000.000	1	1.181.250.000	1	550.000.000	1	577.500.000	1	3.433.750.000	Diskominfotik	kota Blitar

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit	0	1.125.000.001	6	1.181.250.000	6	550.000.000	6	577.500.000	6	1.708.750.000	Diskominfotik	kota Blitar
--	--	--	--	--	--	--	------	---	---------------	---	---------------	---	-------------	---	-------------	---	---------------	---------------	-------------

BAB VII

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

TABEL 7.1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR
TAHUN 2021 – 2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penerapan system elektronik dalam layanan public	3,39%	3,65%	3,91%	4,17%	4,43%	4,69%	5,00%	5,00%
2	Monev Keterbukaan Informasi Publik	60%	66,3%	72,6%	78,9%	85,2%	91,5%	98%	98%
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun	94,83%	95%	96%	97%	98%	99%	100%	100%

	perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan								
4	Indeks KAMI	20,31%	31,01%	38,76%	46,51%	54,26%	62,02%	69,77%	69,77%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2021-2026 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar. Rencana strategis perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan program/ kegiatan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.

Dalam hal ini ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tahun 2021 -2026,
2. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dijadikan acuan dan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan mulai 2021 sampai dengan 2026 unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.
3. Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dalam keterkaitannya dengan rencana kerja Dinas tahun 2021-2026. Apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundangan tentang perangkat daerah dan struktur organisasi dan tata kerja terhadap Rencana Strategis dengan pengacu pada peraturan perundangan yang baru.

Selanjutnya dengan konsistensi terhadap tujuan dan sasaran pada rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tahun 2021-2026 dapat mendukung pelaksanaan capaian kinerja pemerintah daerah khususnya sebagaimana tertuang dalam misi 5 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi ”.

Blitar 18 Juni 2021

 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar
MOH. AMINURCHOLIS.S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 196512251987031008

